

# Bab - 3

## KAJIAN FAKTOR EKSTERNAL



### 3.1 LESSON LEARNED : KONSEP AGRO INDUSTRI

#### 3.1.1 Definisi Agro Industri

Banyak definisi yang pernah dikemukakan tentang Agro Industri. Beberapa diantaranya:

- a. Agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas termasuk hasil laut, hasil hutan, peternakan dan perikanan (**Handito Hadi Joewono**)
- b. Agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan (agro-industri), subsistem pemasaran hasil dan sub sistem penunjang. Agro-industri adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil pertanian khususnya hasil budidaya pesisir dan laut (**Ngangi, E.L.A. 2001**)

#### 3.1.2 Prinsip-prinsip Agro industri

Wibowo (1997) mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya:

- 1) Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah,
- 2) Memacu peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan,
- 3) Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan,
- 4) Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsistem agribisnis,

- 5) Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.

Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan haruslah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan sumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan asset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan.

### **3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Agro Industri**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri pedesaan diarahkan untuk:

- (a) Mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya,
- (b) Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, dan
- (c) Mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri ([www.litbang.deptan.go.id](http://www.litbang.deptan.go.id))

### **3.1.4 Pemahaman terhadap Konsep Pengembangan Kawasan Berbasis Pertanian (Agropolitan)**

Munculnya konsep agropolitan dilatarbelakangi oleh gagalnya beberapa teori dan konsep pembangunan dimasa lalu. Penerapan model pusat-pusat pertumbuhan di negara berkembang seperti Indonesia, melalui strategi industrialisasi dan Agroindustri yang relatif memiliki pertumbuhan cepat, ternyata justru menyebabkan ketimpangan yang semakin besar antara kawasan pedesaan yang

berbasis pertanian dengan kawasan Agroindustri yang berbasis manufaktur dan jasa. Ciri-ciri dari konsep agropolitan ini meliputi:

- (a) merupakan sebuah skala geografi yang kecil;
- (b) memiliki kemandirian (*self-sufficiency* dan *self-reliance*) tingkat tinggi didalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang didasarkan kepada tindakan partisipasi dan kooperatif di tingkatan lokal;
- (c) diversifikasi tenaga kerja perdesaan yang meliputi baik kegiatan pertanian maupun non-pertanian;
- (d) merupakan fungsi-fungsi perindustrian perdesaan dan Agroindustri yang memiliki keterkaitan dengan struktur ekonomi dan sumberdaya-sumberdaya lokal dan
- (e) penilaian dan pemanfaatan teknologi-teknologi dan sumberdaya lokal (Ruben G. Mercado, 2002 : hal.14).

Menurut pemikiran Friedmann (1975), konsep agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km<sup>2</sup>. Efisiensi usaha tani akan terjadi apabila diaksanakan *one district one commodity*. Dalam distrik agropolitan ini akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk 10.000 – 25.000 jiwa.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep agropolitan secara spasial pada saat ini adalah mengintegrasikan antara desa dan kota sebagai keterkaitan ekonomi yang saling membutuhkan dan bersifat interdependensi. Keterkaitan dan interdependensi menurut Mike Douglass (1998) menempatkan fungsi kota sebagai pusat transportasi dan perdagangan pertanian, sedangkan fungsi desa sebagai produksi dan produktivitas pertanian. Desa dan kota merupakan satu kesatuan muatan fungsional wilayah yang seharusnya saling bersinergi dan melengkapi (komplementer).

Menurut Antonius Tarigan (2003) pendekatan keterkaitan desa-kota dalam pembangunan wilayah perdesaan juga dapat menaikkan nilai tukar produk/jasa masyarakat perdesaan melalui : (1) upaya memindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan melalui bantuan modal, sarana produksi dan pelatihan; (2) memperpendek jalur produksi, distribusi, dan pemasaran produk/jasa masyarakat untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan produk/jasa secara spesifik; (3) memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat perdesaan terhadap

faktor-faktor produksi barang/jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana.

Pembangunan agropolitan yang terintegrasi bertujuan untuk menghasilkan sistem ruang terencana yang berperan didalam melayani dan menghubungkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dari manusianya. Sistem ruang ini membentuk keterkaitan antar lokasi-lokasi secara berhirarki (berjenjang) berupa struktur ruang agropolitan. Menurut ESCAP (1979 : hal. 63) jenjang pusat-pusat yang melayani wilayah pembangunan pertanian terdiri dari kota regional (regional city), kota distrik (district town), dan kota lokal (local town). Masing-masing pusat ini memiliki fungsi yang didasarkan kepada kemampuan melayani sejumlah ukuran penduduk. Apabila dikaitkan dengan konsep secondary cities pemikiran Rondinelli, maka kota kedua tersebut adalah kota distrik. Rondinelli dan Ruddle (ESCAP, 1979 : hal 65) mengemukakan bahwa kota distrik merupakan saluran utama didalam memenuhi kebutuhan dasar barang dan jasa penduduk (petani) sebagai pengganti dari hasil-hasil pertanian yang mereka jual. Dalam konsep agropolitan, kota kedua ini dapat dianggap sebagai lokasi pusat-pusat pelayanan pertanian dan perdesaan atau pusat agropolitan. Pusat agropolitan bersama dengan unit-unit pengembangan (setingkat kecamatan) membentuk satu kawasan agropolitan, dimana masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut (Douglass, 1986; diambil dari Ruchyat Deni Djakapermana, 2003 : hal. 7). Pusat agropolitan, berfungsi sebagai:

- a. Pusat perdagangan dan transportasi
- b. Penyedia jasa pendukung pertanian
- c. Pasar konsumen produk non-pertanian
- d. Pusat industri pertanian (agro-based industry)
- e. Penyedia pekerjaan non pertanian
- f. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten

Unit-unit kawasan pengembangan, berfungsi sebagai

- a. Pusat produksi pertanian
- b. Intensifikasi pertanian
- c. Pusat pendapatan perdesaan dari permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian
- d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian

## **3.2 KERANGKA NORMATIF PENGEMBANGAN AGRO-INDUSTRI (SUMBER: RPJM PROVINSI JAMBI)**

### **3.2.1 Visi dan Misi Pembangunan 2006-2010**

Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, yaitu :

*JAMBI MAMPU, MAJU DAN MANDIRI.*

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat
2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah
3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Peningkatan perlindungan masyarakat

### **3.2.2 Strategi dan Agenda Pembangunan Industri**

Terwujudnya visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Jambi tersebut didukung oleh 3 pilar utama, yaitu :

1. Pemerintah Yang Berwibawa dan Bersih dari KKN
2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan
3. Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Siap Untuk Digali Dalam Mengasah Roda Pembangunan.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 4 (empat) **AGENDA PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010**, yaitu :

#### **1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi**

- Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas
- Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja
- Peningkatan Daya Saing Agroindustri

- Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD

## **2. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah**

- Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pembangunan Pedesaan
- Revitalisasi Pembangunan Pertanian
- Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah dan Kawasan  
Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat

## **3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas**

- Peningkatan Pendidikan Yang Berkualitas
- Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas
- Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
- Peningkatan Peran Pemuda dan pembangunan Olahraga
- Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah

## **4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik**

- Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bertanggung Jawab
- Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peningkatan Peranan Pratana Demokrasi
- Peningkatan Tata Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
- Peningkatan Penguatan Implementasi Otonomi Daerah
- Peningkatan Perlindungan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pengembangan sektor industri dan khususnya agro-industri di Provinsi Jambi, terutama **terkait erat dengan 2 agenda pembangunan, yaitu 1) meningkatkan daya saing ekonomi daerah (khususnya peningkatan daya saing agro-industri dan peningkatan pembangunan infrastruktur) dan 2) meningkatkan kemampuan dan pemerataan pembangunan didaerah (khususnya revitalisasi pembangunan pertanian).**

### **3.2.3 Kebijakan dan Program Peningkatan Daya Saing Agro-Industri**

Kebijakan peningkatan daya saing agro-industri ditujukan untuk :

1. Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan kondisi ekologis kawasan dan pengembangan wilayah sesuai dengan komoditi unggulan masing-masing;
2. Meningkatnya nilai tambah yang diterima oleh masyarakat pertanian sebagai dampak proses pengolahan terhadap hasil-hasil pertanian dari bahan primer menjadi bahan jadi atau setengah jadi;
3. Sektor agro-industri ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata di atas 5,0 % per tahun sampai pada tahun 2010. Dengan target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 %, terutama untuk industri pengolahan yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari industri primer ke agro-industri dalam lima tahun mendatang adalah minimal 30 % dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas;
5. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif, baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung;
6. Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan hasil-hasil pertanian di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk luar daerah maupun impor;

7. Meningkatnya volume ekspor produk agro-industri dari total ekspor keseluruhan, terutama pada produk ekspor agro-industri yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan;
8. Meningkatnya proses alih teknologi dari *foreign direct investment (FDI)* yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal;
9. Meningkatnya penerapan standardisasi produk agro-industri sebagai faktor penguat daya saing produk daerah; dan
10. Meningkatnya investasi swasta, baik swasta domestik maupun manca negara di bidang agro-industri.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing agro-industri adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kinerja daya saing agro-industri secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (*necessary condition*) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing agro-industri yang ingin diwujudkan.
2. Perbaikan iklim usaha di segala matarantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki.
3. Diperlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.
4. Untuk mencapai pertumbuhan lebih besar dari 5,0 % per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor agro-industri perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
5. Semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (*multiplier*) di masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan.
6. Kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi perlu ditingkatkan melalui pengamanan pasar daerah dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara

dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor.

7. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan terbatasnya kemampuan sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan agro-industri ditetapkan pada beberapa subsektor yang antara lain: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar daerah dan dalam negeri; (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor.
8. Berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolahan kelapa sawit; (3) industri kerajinan kayu (termasuk rotan dan bambu); (4) industri pengolahan karet dan barang karet; (5) industri pulp dan kertas; dan (6) industri pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan.
9. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan sentra-sentra produksi dengan menetapkan pembagian perwilayahan sesuai dengan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah.
10. Mengembangkan pendekatan yang berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian.
11. Mendorong pengembangan lembaga informasi dan komunikasi untuk mempermudah para investor berinvestasi serta mengembangkan mitra usaha antara pengusaha kecil, menengah dan investor.
12. Upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk masing-masing prioritas. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci ke dalam strategi daerah (dinas/instansi) yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan subsektor industri yang terkait (*related industries*) dan subsektor industri penunjang (*supporting industries*).

Peningkatan daya saing agro-industri di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri atas 2 (dua) program unggulan dan 5 (lima) program penunjang. Program unggulan, yaitu : (1) Pengembangan agribisnis dan (2) Peningkatan kapasitas infrastruktur. Program-program penunjang, yang mencakup : (1) Peningkatan pengetahuan dan

keterampilan SDM, (2) Peningkatan standarisasi produk agro-industri, (3) Peningkatan kemampuan teknologi industri, (4) Penataan struktur industri, dan (5) Optimalisasi administrasi dan insentif perpajakan.

### **1. Pengembangan Agribisnis )\***

Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dalam arti luas, khususnya komoditi pertanian sebagai pendukung usaha agro-industri dan (2) memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan yang berkeadilan sesuai dengan daya dukung wilayah;
2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan;
3. Memberdayakan masyarakat pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian;
4. Melakukan promosi ekspor komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif;
5. Mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional yang dapat dijadikan bahan baku usaha agro-industri;
6. Memfasilitasi dan mendorong usaha milik daerah yang berskala besar untuk berperan aktif dalam pengembangan agribisnis;
7. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agribisnis termasuk pengembangan lembaga informasi, penyuluhan, investasi, laboratorium pengawasan mutu barang serta pelayanan lainnya;
8. Meningkatkan dan mengembangkan riset di bidang pertanian dan industri; dan
9. Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah dan antar negara.

### **2. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur )\***

Program ini bertujuan untuk mendukung segala aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan agro-industri. Sehingga dengan demikian upaya menumbuhkembangkan agro-industri bukan merupakan program yang

berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dan bergantung satu sama lain dengan berbagai program pembangunan di Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi :

1. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan sarana transportasi (darat, laut dan udara);
2. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan sarana informasi dan komunikasi;
3. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan sarana investasi;
4. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral; dan
5. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan sarana permodalan.

### **3. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sektor pertanian dan industri sehingga mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan industri yang mampu bersaing di pasar kerja nasional dan global. Sejalan dengan itu juga akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, terutama bagi para petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

1. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian;
2. Memberdayakan kembali keberadaan para penyuluh lapangan pertanian dan memberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas termasuk dalam menentukan wilayah kerja;
3. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
4. Menumbuhkembangkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat tani;

5. Memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) daerah;
6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja;
7. Mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan di daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kinerja pertanian dan industri; dan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.

#### **4. Peningkatan Standardisasi Produk Agro-Industri**

Program ini bertujuan untuk : (1) memperkuat daya saing produk-produk agro-industri, (2) meningkatkan kualitas produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pasar di dalam maupun di luar negeri, dan (3) memberikan perlindungan yang pasti kepada konsumen. Kegiatan pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan standardisasi produk agro-industri terutama mencakup :

1. Mengembangkan infrastruktur kelembagaan standardisasi daerah yang berkenaan dengan produk agro-industri;
2. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pembukaan cabang untuk daerah Jambi untuk produk agro-industri;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan demonstrasi (praktek kerja/lapangan) untuk mendapatkan produk yang sesuai standar yang diinginkan; dan
4. Meningkatkan persepsi masyarakat, terutama untuk standar produk agro-industri.

#### **5. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam mencipta, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji komersialisasi hasil litbang, rancang produk baru, maupun proses produksi. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi antara lain :

1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi industri baik dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi;
2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup serta teknik produksi yang ramah lingkungan (*clean production*);
3. Memperluas penerapan standar produk agro-industri yang sesuai (*compliance*) dengan standar internasional;
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran dan penetapan, standardisasi, pengujian, dan kualitas (*MSTQ/ measurement, standardisasi, testing, and quality*);
5. Mengembangkan kluster industri berbasis teknologi; dan
6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah.

## **6. Penataan Struktur Industri**

Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri daerah baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Untuk mewujudkan tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi industri, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (*good corporate governance*) secara sistematis dan konsisten, dan menurunkan besarnya hambatan masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. Perlu pula ditingkatkan iklim persaingan secara sehat untuk mendorong perusahaan berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan global. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan antara lain mencakup :

1. Pengembangan sistem informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait;
2. Mendorong terjalinnya kemitraan antara industri penunjang dan industri terkait;

3. Mengembangkan industri penunjang dan industri terkait terutama dalam menetapkan kesepakatan akan kebutuhan dan kontribusi masing-masing;
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil sesuai kebutuhan;
5. Memfasilitasi pengembangan prasarana kluster industri, terutama prasarana teknologinya; dan
6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan kluster industri dari berbagai daerah.

#### **7. Optimalisasi Administrasi Dan Insentif Perpajakan**

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan yang prima dan berbagai kemudahan bagi upaya-upaya penanaman modal dalam mengembangkan agro-industri, terutama yang berhubungan dengan administrasi (birokrasi) dan perpajakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan reformasi perpajakan dan reformasi kepabeanan serta program pengembangan kelembagaan keuangan yang di dalamnya mempunyai langkah-langkah untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit bagi usaha-usaha yang bergerak di sektor agro-industri.

#### **3.2.4 Kebijakan dan Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastuktur adalah bagian integral dari pembangunan wilayah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengolahan sumberdaya air berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi, dan informatika, sumberdaya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru dapat menghambat laju pembangunan suatu wilayah. Rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, pada 5 (lima) tahun ke depan perlu dipertegas penanganan/rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PSO menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Untuk ini perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD.

Untuk kegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh usaha swasta perlu diperjelas peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama menyangkut garansi dan sistem tarif. Berkaitan dengan keikutsertaan swasta membangun infrastruktur perlu diperjelas kewenangan masing-masing investor swasta dengan BUMN/D terkait, serta menghindarkan hak monopoli untuk berusaha pada bidangnya.

### **3.2.5 Kebijakan dan Program Revitalisasi Pembangunan Pertanian**

Kebijakan dan program revitalisasi pembangunan pertanian ditujukan untuk mencapai sasaran :

1. Mampunya petani menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
2. Tersedianya beras dengan tingkat produksi yang cukup atau surplus untuk pemenuhan kebutuhan lokal (swasembada pangan) serta berperannya kembali lumbung-lumbung beras di Provinsi Jambi.
3. Meningkatnya diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
4. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan.
5. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak dan ikan bagi masyarakat
6. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dengan harga terjangkau.

7. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan.
8. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
9. Meningkatnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu secara optimal

Ada **empat langkah pokok** yang ditempuh dalam Revitalisasi pertanian yakni peningkatan kemampuan petani serta penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.

Kebijakan dalam **pengamanan ketahanan pangan** (swasembada pangan) diarahkan untuk:

1. Mempertahankan tingkat produksi beras yang surplus dari kebutuhan dengan melakukan pengamanan lahan sawah terutama lahan subur (*prime land for agriculture*) di daerah irigasi berproduktivitas tinggi.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan melalui peningkatan populasi hewan dan produksi pangan hewani (ikan) agar ketersediaannya lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
3. Meningkatkan dan melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan memodifikasi pola konsumsi masyarakat dengan melalui peningkatan minat dan konsumsi pangan alternatif.

Kebijakan dalam Peningkatan **kemampuan petani dan nelayan**, pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:

1. Melaksanakan revitalisasi penyuluhan dan melakukan pendampingan terhadap petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.
2. Memperkuat dan menghidupkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif.
3. Meningkatkan skala usaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.

Kebijakan dalam **peningkatan produktivitas, produksi** dan daya saing produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap; (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya pertanian dan perikanan; (5) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (6) peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh pertanian dan perikanan; (7) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis.
2. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan dengan mendorong untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, **keamanan pangan** dan melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
3. Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Pemanfaatan **hutan** untuk **diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan** dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu dengan kebijakan yang diarahkan pada :

1. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu;
2. Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman;
3. Peningkatan produksi hasil hutan non kayu (rotan, tanaman obat dan madu) untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Arah kebijakan tersebut di dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut.

#### **1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi :

- ❑ Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi yang berbasis lokal;
- ❑ Peningkatan distribusi pangan dan ketersediaan stock pangan secara merata di setiap kabupaten;
- ❑ Peningkatan efisiensi system dan jaringan distribusi pangan yang menjamin keterjangkauan harga bahan pangan;
- ❑ Pengembangan Model Site-Spesific dan alat pengambilan keputusan untuk usaha padi sawah
- ❑ Peningkatan Produktivitas dan produksi pangan serta diversifikasi komoditi penghasil pangan pada areal perkebunan
- ❑ Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil serta peningkatan diversifikasi pangan
- ❑ Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu.
- ❑ Pengembangan kawasan sentra peternakan dan integrasi ternak tanaman serta pengelolaan lahan dan air (padang penggembalaan ternak, kebun hijauan makan ternak, sertifikasi padang penggembalaan).
- ❑ Koordinasi Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Penyusunan Data Base/Statistik Ketahanan Pangan Wilayah serta Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

## **2. Program Pengembangan Agribisnis**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa pendukungnya.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi :

- ❑ Pengembangan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional.

- ❑ Peningkatan Program pendidikan dan pelatihan bagi para petugas pertanian dan petani.
- ❑ Pengembangan Sentra Buah-buahan unggulan, tanaman pangan dan sayuran spesifik lokasi.
- ❑ Rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi perkebunan.
- ❑ Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida
- ❑ Pengembangan diversifikasi usahatani dan perlindungan usaha perkebunan
- ❑ Penyediaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan bibit bermutu
- ❑ Peningkatan nilai tambah produk pertanian/perikanan melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran;
- ❑ Pengembangan infrastruktur (sarana prasarana) pertanian, peternakan, perikanan serta perdesaan;
- ❑ Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan berupa bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat atau bergulir.
- ❑ Pengembangan agribisnis peternakan melalui pengembangan sentra, agropolitan, sistem informasi peternakan, penerapan teknologi pemasaran hasil, kelembagaan dan kemitraan usaha.

### **3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah :

- ❑ Pemberdayaan masyarakat pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian melalui pelatihan dan studi banding.
- ❑ Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- ❑ Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan dan pembudidaya ikan;
- ❑ Pemberdayaan Petani melalui pelatihan dan penguatan asosiasi perkebunan.
- ❑ Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian/perikanan.

- ❑ Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan melalui perdayaan petani.

#### **4. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan**

Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi :

- ❑ Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- ❑ Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar;
- ❑ Penataan kembali usaha budidaya tambak (air payau) dan air tawar;
- ❑ Penyempurnaan sistem perbenihan serta peningkatan pembangunan sarana prasarana perikanan;
- ❑ Peningkatan usaha perikanan skala kecil dan peningkatan pemasaran, mutu, dan nilai tambah produk perikanan;

#### **5. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan**

Program ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi sumberdaya hutan, secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilakukan melalui program ini meliputi :

- ❑ Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi;
- ❑ Pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu atau HPH kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu;
- ❑ Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir hutan atau transmigran) dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari,
- ❑ Peningkatan rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi untuk pertanian.

#### **6. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan pokok :**

- ❑ Memfasilitasi daerah untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan.
- ❑ Mendorong pertumbuhan agroindustri yang berdaya saing melalui pemberian insentif yang menarik untuk penanaman modal seperti kemudahan perpajakan, perizinan
- ❑ Mengembangkan pasar bagi produk hasil segar dan hasil olahan, melalui peningkatan akses terhadap informasi pasar dan jaringan pemasaran.
- ❑ Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil dan menengah kepada sumber-sumber permodalan.

**7. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan** dengan kegiatan pokok :

- ❑ Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial.
- ❑ Pengembangan prasarana ekonomi perdesaan terutama prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan.
- ❑ Pemantapan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan perdesaan dalam pengelolaan kegiatan pertanian, kelautan, perikanan, agrobisnis, dan agroindustri.

**3.2.6 Pengembangan Klaster Industri dan Pemasaran dalam Rangka Menunjang Program Pengembangan JAIP**

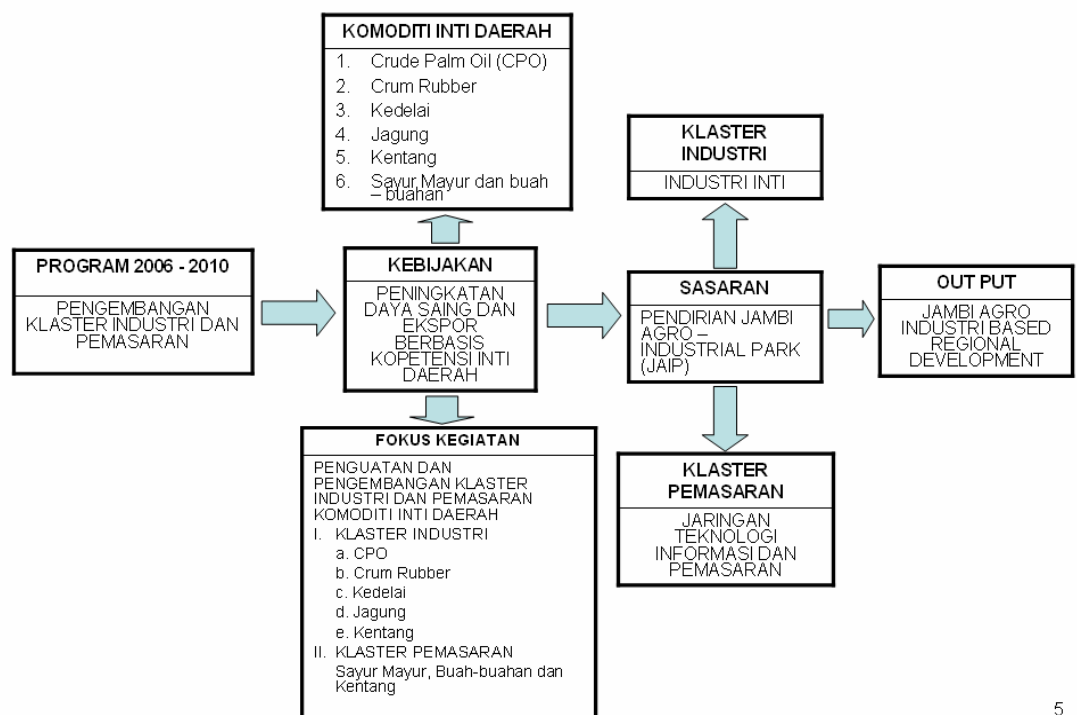
*(Sumber : Presentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Juni 2006)*

Beberapa hal penting yang melatarbelakangi konsep pengembangan klaster industri ini adalah :

- ❑ Komoditi hasil perkebunan dan pertanian merupakan salah satu komoditi andalan Provinsi Jambi dengan kontribusi PDRB berdasar lapangan usaha sebesar 29,89 % dari total PDRB Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.759.393 Juta Tahun 2004.

- ❑ Terbukanya peluang pasar domestik maupun internasional terutama produk industri hilir pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
- ❑ Terjadinya penurunan laju pertumbuhan Sub-Sektor Industri Menengah Besar yakni 1,74 % Tahun 2004 menjadi 1,02% Tahun 2005
- ❑ Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Rata-rata 4,72 % pertumbuhan tersebut 38% berasal dari sektor primer yang memberikan multiplier effect relatif kecil pada masyarakat.

**Gambar 3. 1 Alternatif Penanganan Masalah**



5

- ❑ Selama ini industri hilir Crum Rubber, Crude Palm Oil (CPO) dan beberapa jenis hasil Produksi Pertanian diolah diluar Provinsi Jambi hal ini berakibat pada rendahnya nilai tambah produk tersebut yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya pendapatan petani.
- ❑ Kecenderungan pelaku ekspor di Provinsi Jambi masih mengandalkan ekspor produk komoditi perkebunan dan pertanian dalam bentuk bahan mentah maupun barang setengah jadi.

- ❑ Komoditi perdagangan dalam bentuk bahan mentah maupun barang setengah jadi secara umum memiliki daya saing rendah dan rentan terhadap perubahan harga di pasar global.
- ❑ Lemahnya posisi petani produsen pada penentuan harga komoditi di pasaran lokal maupun internasional.

### 3.3 KONDISI PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI (SUMBER: FS PENGEMBANGAN JAIP)

Berdasarkan analisis Input-Output Manufaktur Provinsi Jambi, diketahui bahwa kegiatan industri pengolahan yang dominan di Provinsi Jambi dapat dikategorikan sebagai **industri yang berbasis Agrobisnis**. Hal ini terlihat bahwa pada kurun 1990 - 2005, kontribusi kelompok industri Agrobisnis tidak kurang dari 95% dari total output industri manufaktur.

Industri yang mendominasi perekonomian Provinsi Jambi dalam klasifikasi agregasi ISIC 3 digit adalah sebagai berikut:

- 341 Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya → kontribusinya meningkat terus
- 311 Industri makanan-1 → kontribusinya cenderung meningkat hingga 2005
- 355 Industri karet dan barang dari karet → kontribusi berfluktuasi, tetapi menurun terus.
- 331 Industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya → kontribusinya menurun terus

Sementara industri yang berbasis non Agroindustri hanya menempati porsi yang sangat kecil, yaitu tidak lebih dari 5% selama periode 1990-2005.

Selain menempati kontribusi yang sangat besar, **industri pengolahan yang berbasis Agrobisnis juga memiliki laju pertumbuhan nilai output rata-rata per tahun yang sangat besar** dalam periode 1994-2005. Industri ISIC 3 341 tumbuh dengan laju 52.56% per tahun selama periode 1994-2005. Kemudian ISIC3 311 dan 355 masing-masing tumbuh dengan laju 34.02% dan 12,06% per tahun dalam periode yang sama.

**Tabel 3.1 Deskripsi Kode ISIC 3**

ISIC 3	Deskripsi ISIC 3
311	Industri makanan-1

312	Industri makanan-2
313	Industri minuman
314	Industri pengolahan tembakau dan bumbu rokok
321	Industri tekstil
322	Industri pakaian jadi, kecuali untuk alas kaki
323	Industri kulit dan barang dari kulit, kecuali untuk alas kaki
324	Industri alas kaki
331	Industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya
332	Industri perabotan & kelengkapan RT serta alat dapur dari kayu, bambu & rotan
341	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya
342	Industri percetakan dan penerbitan
351	Industri bahan kimia industri
352	Industri kimia lain
353	Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, serta gas bumi
354	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi dan batu bara
355	Industri karet dan barang dari karet
356	Industri barang dari plastik
361	Industri porselin
362	Industri gelas dan barang dari gelas
363	Industri semen, kapur dan barang dari semen dan kapur
364	Industri pengolahan tanah liat
369	Industri barang galian lain bukan logam
371	Industri logam dasar besi dan baja
372	Industri logam dasar bukan besi
381	Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya
382	Industri mesin dan perlengkapannya, kecuali mesin listrik
383	Industri mesin, peralatan & perlengkapan listrik serta bahan keperluan listrik
384	Industri alat angkutan
385	Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur
390	Industri pengolahan lainnya

Industri berbasis Agrobisnis dengan kontribusi besar tetapi tumbuh melambat yaitu ISIC 331 (kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya). Perkembangan output ISIC 331 sangat bergantung dari stock bahan baku yang disediakan alam.

Disamping industri-industri di atas, ke depan yang berpotensi memberikan kontribusi besar adalah industri ISIC3 313 (industri minuman), karena pertumbuhannya cukup besar.

#### **Jambi 'vs' Nasional**

Perbandingan komposisi output industri di Jambi dan di Nasional menggambarkan “keunggulan komparatif” industri di Provinsi Jambi dengan perekonomian nasional pada umumnya. Industri yang mendominasi perekonomian Jambi ternyata juga memiliki angka LQ di atas 1 berarti memiliki posisi unggul secara komparatif. Industri-industri yang unggul tersebut adalah:

- 341 Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya
- 355 Industri karet dan barang dari karet
- 311 Makanan
- 331 Industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

- ❑ Industri manufaktur yang mendominasi kegiatan pengolahan di Provinsi Jambi adalah berbasis Agroindustri. Namun tidak berarti industri yang berbasis Agroindustri selalu mendominasi industri pengolahan.
- ❑ Posisi dominasi industri manufaktur berbasis agroindustri dimasa mendatang berpotensi semakin kuat karena memiliki kecenderungan laju pertumbuhan yang sangat besar, terutama dialami oleh ISIC3 311, 341 dan 355. Status dominansi ISIC 331 ke depan akan semakin melemah.
- ❑ Industri yang dominan dan dimasa mendatang berpotensi kuat tersebut, ternyata memiliki keunggulan komparatif dalam level nasional. Jika pertumbuhannya bisa dijaga, maka ke depan industri-industri tersebut akan semakin unggul secara komparatif di level nasional.

### **Jambi 'vs' Riau (sebagai Pembanding)**

Di Provinsi Riau, industri yang mendominasi perekonomian adalah ISIC3: 383, 311, 341, 331, 381, dan 355. ISIC3 yang tergolong berbasis Agrobisnis adalah 311, 341, 331, dan 355, sedangkan ISIC3 381 dan 383 tergolong industri logam dan mesin (non agroindustri).

Kontribusi agrindustri terhadap total industri manufaktur di Provinsi Riau mengalami pasang surut. Pada awal tahun 1990-an, industri manufaktur berkontribusi sangat besar kemudian menurun mencapai angka terbawah pada 1997, dan sejak itu meningkat pesat hingga tahun 2005. Di lain pihak pola perkembangan non-agroindustri berlawanan arah dengan pergerakan kontribusi agroindustri.

Perkembangan agroindustri di Provinsi Riau juga memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, terutama ISIC3 311,341 dan 355. Penurunan kontribusi yang dialami oleh ISIC3 331 di dialami juga oleh Provinsi Riau. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pola perkembangan agroindustri di Provinsi Riau searah dengan di Jambi

Jika dilihat dari keunggulan komparatif agroindustri di Riau, ternyata nilai keunggulannya menunjukkan pola yang menurun, kecuali ISIC3 341. Sementara di Provinsi Jambi indikator keunggulan komparatifnya semakin menguat. Sebaliknya industri berbasis non agroindustri di Provinsi Riau memiliki keunggulan kompartif yang semakin kuat, yaitu ISIC3 383 dan 385. Secara rinci pola pergeseran keunggulan kmparatif di Riau sbb:

- 331 → pada akhir pengamatan menurun
- 341 → selalu tinggi kecuali pada periode krisis ekonomi
- 355 → hingga 1997 tinggi, tetapi sejak itu tidak memiliki  
keunggulan komparatif
- 383 → sepanjang periode pengamatan tinggi terus
- 385 → sepanjang periode pengamatan tinggi terus

### **Jambi 'vs' Sumatera Selatan (sebagai Pembanding)**

Industri manufaktur yang mendominasi Provinsi Sumatera Selatan adalah ISIC3 341, 311, 351, 331 dan 341. Dari kelima ISIC3, yang dominan yang tergolong Agroindustri adalah ISIC3 355, 311, 331 dan 341.

- 355 Karet dan barang dari karet → kontribusinya tergolong stabil dalam periode 1990-2005, bahkan cenderung meningkat pad 2005.
- 311 Makanan termasuk di dalamnya pengolahan produk kelapa sawit → kontribusinya stabil tetapi anjlok pada 2005.
- 331 Kayu, bambu dan rotan → kontribusinya menurun terus (sama dengan yang terjadi di Jambi).
- 341 Industri pulp, kertas dan barang dari kertas → baru muncul mulai tahun 2001.
- 351 Industri kimia industri → tidak tergolong industri manufaktur berbasis Agroindustri → kontrbusi stabil, anjlok pada 2005.

### **Peluang Pengembangan Agroindustri Jambi**

- ❑ ISIC3 355 paling prospektif, karena kontribusinya besar dan laju pertumbuhannya sangat tinggi.
- ❑ ISIC3 311 berkontribusi besar, tetapi pertumbuhannya lambat.
- ❑ ISIC3 311 berkontribusi besar, tetapi pertumbuhannya lambat.
- ❑ ISIC3 341 berkontribusi cukup besar, dan tumbuh dengan laju yang cepat pada akhir periode pengamatan (2000-2005)
- ❑ Dari industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif tinggi (355, 351, 331, 341, 311, dan 363) ternyata empat diantaranya adalah Agroindustri yaitu ISIC3 355, 331, 341, 311, dengan pola keunggulan sebagai berikut :

311	Posisi unggul, stabil, tetapi anjlok pada tahun 2005.
331	Posisi unggul stabil
341	Posisi unggul, dengan derajat keunggulan cenderung menurun.
355	Posisi unggul stabil dengan derajat keunggulan paling tinggi.